

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya, berkaitan dengan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan seperti karyawan, manajemen perusahaan, investor serta kreditor yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Pihak eksternal perusahaan seperti kehidupan sosial dan lingkungan yang berdampak langsung terhadap perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat banyak melakukan CSR dalam program pelestarian sungai Citarum. Dalam konteks lain, PT. Sampoerna melakukan kegiatan CSR dengan mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPK Sampoerna) yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat (Sindonews.com, 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan yang diungkapkan melalui media laporan keberlanjutan. laporan keberlanjutan yang memuat laporan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan lebih rinci berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Sehingga laporan keberlanjutan mendorong organisasi agar lebih transparan dan dapat untuk digunakan untuk mengukur kinerja baik ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. maka dari itu, dilakukan penelitian terhadap

perusahaan yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun disisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktifitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja, kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam. Sebagai contoh ada beberapa kasus yang terkait dengan ketidakpuasan publik atas aktivitas perusahaan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur; Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi; PT Freeport di Irian Jaya, dan masih banyak lagi (Puspita dewi, 2016).

Dengan adanya dampak sosial dan lingkungan tersebut, banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pemerintah memberlakukan undang-undang terkait lingkungan hidup yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pembangunan Keberlanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 Thn 2009).

Untuk ikut menyukseskan dan berpartisipasi terhadap undang – undnag tersebut perusahaan-perusahaan juga ikut andil dalam aksi kepedulian lingkungan. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 40 Pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (HAYATI) berkerja sama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks yang bernama Indeks SRI Kehati. Indeks tersebut mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada publik terkait perusahaan yang memiliki citra kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi serta perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan dan melaporkan tanggungjawab lingkungan secara transparan kepada publik.

Pengungkapan yang transparan kepada publik merupakan salah satu prinsip manajemen dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan rancana dan aktivitasnya kepada pihak yang berkepentingan kepada perusahaan. Prinsip transparan dilakukan oleh perusahaan dalam penerbitan laporan-laporan terkait perkembangan perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan umumnya membuat dua laporan yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Menurut kamus Bank Indonesia, Laporan Tahunan adalah laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih dalam suatu organisasi dalam setahun. Ikatan Akuntansi Indonesia mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan Kinerja Keuangan dalam sebuah entitas dengan tujuan untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/PJOK.03/2017 Bab 4 Pasal 10 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik menyatakan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik Wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Pada peraturan yang sama PJOK No.51/PJOK.03/2017 menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut perusahaan diharapkan dapat menerbitkan tiga laporan dalam setahun yaitu laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan diperlukan perusahaan yang disebabkan oleh Pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan sudah kurang efektif karena dapat digunakan oleh manajer sebagai alat untuk mengamankan kedudukannya, dan digunakan untuk mengalihkan perhatian *stakeholder* dari *monitoring* aktifitas manajemen laba (Prior *et al.*, 2008). Hal tersebut mungkin terjadi karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pihak berkepentingan lainnya. Disebabkan oleh tidak sempurnanya audit di dalam praktek ekonomi, sehingga manajer dapat memiliki insentif merenkayasa *income* yang dilaporkan untuk memaksimalkan kepentingannya. Dengan mengadopsi asumsi dalam teori keagenan bahwa manajemen akan berperilaku oportunistik, maka manajemen dapat memberikan informasi yang berlebih melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dan

lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan untuk mengalihkan perhatian para pengguna laporan keuangan dari manajemen laba yang dilakukan.

Laporan Keberlanjutan telah dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) sejak tahun 1999 hingga tahun 2015 telah mendapatkan respon yang luar biasa dari perusahaan dan telah diterapkan sekitar 1.000 perusahaan global. Kawasan ASEAN, banyak perusahaan yang telah menggunakan laporan keberlanjutan dalam menyajikan laporan kepada pihak berkepentingan. Berikut adalah data penggunaan laporan keberlanjutan di ASEAN :

Tabel 1.1
Perbandingan data pengguna laporan keberlanjutan di kawasan ASEAN

NEGARA	TOTAL
Cambodia	1
Indonesia	85
Malaysia	59
Philippines	30
Singapore	54
Thailand	97
Vietnam	12

Sumber: *Nation Center Sustainability Report (NCSR) 2017*

Tingginya pengguna laporan keberlanjutan dalam tabel diatas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia bahwa per 12 September 2017 jumlah perusahaan *go public* di Indonesia adalah sebanyak 624 perusahaan diantaranya BUMN dan perusahaan swasta (*private*). Dari 115 BUMN yang ada di Indonesia hanya sebanyak 19 perusahaan yang sudah *go public* dan hanya terdapat 12 perusahaan BUMN yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan selama 5 tahun berturut - turut. Bila dipersentasekan sekitar 68,5% dari total perusahaan

BUMN yang *go public* di Indonesia mengungkapkan laporan keberlanjutan secara teratur. Hal tersebut disebabkan perusahaan BUMN harus melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menyebabkan laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela.

Perkembangan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan publik termasuk BUMN yang *go public* melalui laporan keberlanjutan semakin dibutuhkan. Hal ini dikarenakan oleh pengungkapan sosial dan lingkungan yang terdapat di Laporan Tahunan masih sangat sederhana sehingga mudah digunakan oleh manajer sebagai pengalihan fokus pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dari pengungkapan ekonomi perusahaan yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan audit dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, laporan keberlanjutan diterbitkan sesuai dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 yang merupakan pedoman berstandar Internasional yang memudahkan pemangku kepentingan dalam memilah informasi mengenai sosial dan lingkungan perusahaan.

Perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan publik/BUMN lebih banyak diawasi oleh pemerintah. Walaupun BUMN sudah berada pada pengawasan pemerintah masih banyak kegiatan perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di masyarakat. Seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah oleh PT. Semen Indonesia. Pembangunan pabrik semen tersebut paling tinggi berdampak terhadap kuantitas dan kualitas air resapan tanah sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah sumber mata air di daerah tersebut (Rahmawati, 2017). Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Pengungkapan

Sosial dan Lingkungan perusahaan BUMN diataranya adalah ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor dalam pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin luas pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Suripto (1999) bahwa umumnya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, keterampilan karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan yang luas. Pada umumnya perusahaan besar memiliki informasi yang lebih lengkap sehingga besar kemungkinan pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan tersebut (Rahmawati, 2011). Dalam teori legitimasi ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Gray *et, al* (2001), Browrin (2013) semakin besar perusahaan mencerminkan sumberdaya yang dimiliki mampu membuat laporan yang bersifat sukarela untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Mahdar (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2016) yang menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti berasumsi bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan BUMN di Indonesia. Dikarenakan ukuran perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sosial dan lingkungan perusahaan.

Selain melalui ukuran perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut Hanafi (2007), kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Kinerja keuangan dalam penelitian ini merujuk pada Rasio *Return On Asset* (ROA). Menurut Kasmir (2014) ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu informasi tentang kesuksesan keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, perusahaan berharap para pengguna laporan akan membaca kinerja misalnya dalam lingkup sosial dan lingkungan sehingga investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan khususnya Rasio *Return On Asset* (ROA), seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2017) menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. selaras dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Sugiharto (2013) yang memberikan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap intensitas pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suraenah (2011) memberikan hasil bahwa profitabilitas yang diwakili oleh *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh *Return On Asset* (ROA) dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan BUMN di Indonesia.

Struktur kepemilikan yang memperhatikan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah struktur kepemilikan institusional. Menurut Machmud dan Djakman (2008) semakin besar kepemilikan saham institusional maka semakin efektif pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan aktiva yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitoring manajemen, dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham dan dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan memberikan berbagai hasil seperti penelitian yang dilakukan Nurkin (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tanggungjawab sosial perusahaan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasmadi dan Djoko (2006) yang

memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan pendapat peneliti sebelumnya Raverte (2008) menyatakan bahwa Struktur kepemilikan terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di Spanyol. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti berasumsi bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan BUMN di Indonesia.

Berbagai penelitian yang terkait mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memberikan hasil bahwa faktor *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan yang dibuatnya untuk mengurangi sorotan dari *Bondholder*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena semakin rendah profitabilitas maka semakin besar pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan umur perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari,dkk (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan hasil bahwa ROA, EPS, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Berbagai penelitian yang terkait mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Nurklin (2009) yang menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, komposisi dewan komisaris terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurklin (2009) dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut perusahaan yang diteliti adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sedangkan dalam penelitian ini perusahaan yang di teliti adalah seluruh perusahaan BUMN *go public* yang menerbitkan laporan keberlanjutan selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013-2017. Dalam penelitian oleh Nurklin (2009) Variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dan profitabilitas dengan proksi ROE serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan tiga variabel yaitu ukuran perusahaan, kinerja keuangan yang diwakili oleh ROA dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada pengungkapan sosial perusahaan (CSR) yang diteliti dalam laporan tahunan perusahaan sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan dalam melihat perkembangan pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN di Indonesia.

Dengan ketidakkonsistenan hasil oleh penelitian terdahulu maka akan dilakukan pengujian kembali pada beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan BUMN tahun 2013-2017)**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Banyak perusahaan publik yang belum menerapkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengenai pengungkapan laporan berkelanjutan.
- 1.2.2 Perusahaan publik masih menganggap laporan keberlanjutan sebagai laporan yang bersifat sukarela.

1.2.3 Ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin dapat melaporkan laporan keberlanjutan tepat waktu dan teratur.

1.2.4 Pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan masih sangat sederhana maka diperlukan laporan terpisah yang lebih spesifik.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan perusahaan (Studi Empiris pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan BUMN periode 2013-2017) tersebut sehingga peneliti dapat mengetahui pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan sudah berjalan dengan efektif.

1.4 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara positif Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN?

1.4.2 Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh secara positif Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN?

1.4.3 Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara positif Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN?

1.4.4 Apakah ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan BUMN?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN.

1.5.2 Untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN.

1.5.3 Untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN.

1.5.4 Untuk mengetahui Pengaruh ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan BUMN.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Tingkat Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan institusional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat menambah memberikan informasi kepada investor terkait pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional mempengaruhi Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Institusional mempengaruhi Pengungkapan Sosial dan Lingkungan perusahaan BUMN dalam laporan lain dan indeks yang berbeda.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan referensi kepada masyarakat untuk memahami pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan BUMN yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan institusional.

4. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan referensi kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha untuk memahami pengungkapan sosial lingkungan pada perusahaan

BUMN yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan institusional.

